



**JURNAL BISNIS MAHASISWA**

Journal homepage: <https://jurnalbisnismahasiswa.com>

E-ISSN: 2807-2219

## **Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi**

***Flypaper effect in Java Island:***

***The effect of local own-source revenues and transfers to local government on local  
expenditure, with the moderation of economic growth***

**Dewi Martika Apriliani<sup>1\*</sup>, Tettet Fitrijanti<sup>2</sup>, Ken Paramitha Aryana<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Pulau Jawa selama periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* dengan pendekatan *explanatory sequential*. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa TKD dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun besarnya pengaruh TKD mengindikasikan terjadinya *flypaper effect* di sebagian besar daerah. Pertumbuhan ekonomi terbukti memperkuat pengaruh TKD dan PAD terhadap belanja daerah. Fenomena *flypaper effect* pada tahun 2018-2023 dialami oleh 78% dari 113 daerah di Pulau Jawa. Temuan kualitatif memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana TKD yang diterima, melainkan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran dan kebijakan belanja daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

**Kata Kunci:** *Flypaper Effect*, TKD, PAD, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

### **Abstract**

This study aims to analyze the *flypaper effect* in regencies and cities on Java Island from 2018 to 2023 using a *mixed-methods approach* with an *explanatory sequential design*. Quantitative results show that both TLG and LOSR have a significant impact on local spending; however, the more substantial effect of TLG suggests the presence of the *flypaper effect* in most regions. Economic growth strengthens the influence of TLG and LOSR on spending. Between 2018 and 2023, 78% of the 113 areas in Java experienced this phenomenon. Qualitative findings reveal that regional development success depends not only on the amount of TLG funds received but also heavily on budget management and spending policies. This research aims to inform government policy-making, promoting sustainable fiscal policies and enhancing regional budgetary independence.

**Keywords:** *Flypaper Effect*, TLG, LOSR, Regional Expenditure, Economic Growth

### **Histori Artikel:**

Diterima 20 Juli 2025, Direvisi 14 September 2025, Disetujui 16 September 2025, Dipublikasi 29 September 2025.

### **\*Penulis Korespondensi:**

dewimartikaa@gmail.com

### **DOI:**

<https://doi.org/10.60036/jbm.817>

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu, salah satunya adalah perubahan sistem otonomi daerah di Indonesia. Peralihan sistem sentralisasi di masa orde baru ke sistem desentralisasi di era reformasi ini, telah melahirkan harapan baru untuk pembangunan daerah. Menurut Aryaputra dkk., (2022) desentralisasi juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk mendistribusikan sumber daya nasional yang lebih efisien dan adil. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada setiap daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Proporsi dana TKD dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau status Daerah penghasil DBH.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan capaian yang sesuai dengan ekspektasi. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan belanja daerah (Pramudya & Anis, 2024). Pengelolaan keuangan yang mandiri diperlukan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, dan potensi pemerintah daerah untuk mengelola yang efektif dan efisien harus dioptimalkan mengingat berbagai tantangan yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah (Afrizal & Khoirunurrofik, 2022). Kemandirian keuangan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya (Laila, dkk., 2022) dalam (Dewi & Aminda, 2023).

Pemerintah pusat telah mengakui kemandirian daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang dikelola sendiri dan dengan mengurangi dana transfer yang bertujuan untuk mengatasi ketergantungan daerah (Khairi, 2021) Di sisi lain, beberapa daerah memiliki pengelolaan yang baik dalam keuangan yang baik meskipun memiliki kekurangan dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun dapat memaksimalkan potensi pajak daerahnya yang cukup besar. Sementara itu, beberapa daerah lainnya mengalami keterbatasan baik dalam infrastruktur ekonomi maupun sumber daya. Sebagai konsekuensinya, produk domestik bruto (PDB) per kapita yang dihasilkan bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya (Hamsyi & Fitriyani, 2021). Dalam memenuhi kekurangan yang dimiliki daerah dan memperkecil *fiscal gap*, pemerintah pusat membantu dalam bentuk TKD yang disalurkan bertahap atau sekaligus melalui pemindahan dari kas pusat ke kas daerah. (Hamsyi & Fitriyani, 2021) Kebijakan penyaluran TKD tersebut memiliki banyak dampak positif bagi pemerintah daerah, tetapi jika dilihat kembali kebijakan tersebut dapat membuat disinsentif atau demotivasi pada pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan kemalasan fiskal dan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat (Dewi & Aminda, 2023).

Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menimbulkan sebuah fenomena yang disebut dengan *flypaper effect*. Menurut Hamsyi & Fitriyani (2021) *flypaper effect* adalah kondisi dimana pengeluaran pemerintah daerah memberikan respons yang lebih signifikan terhadap dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Fenomena ini bertolak belakang dengan tujuan awal desentralisasi dan otonomi daerah yang menuntut kemandirian fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan data dari BPS kemampuan keuangan berdasarkan PAD pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2018-2023 hanya sebesar 15-17%. Berdasarkan postur APBD tahun 2023 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), transfer dari pemerintah pusat sekitar 64,9% terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

oleh BPK RI, sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah, atau sekitar 88,07%, masih tergolong dalam kategori "Belum Mandiri" menurut Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh kebutuhannya sendiri melalui PAD tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat (Asriadi Putra dkk., 2024).

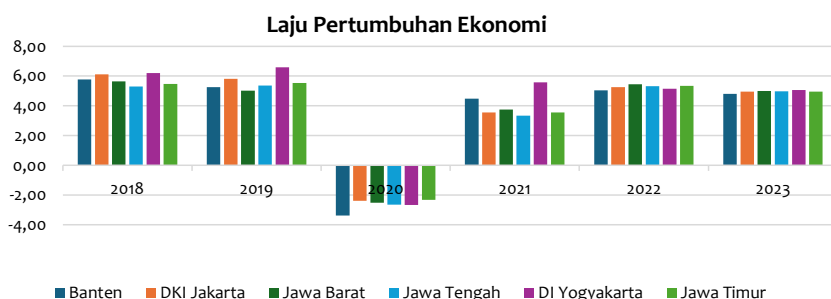
Pulau Jawa sebagai pulau dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2018-2023 sebesar 3,82%. Pada tahun 2023 data di BPS menunjukkan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat dengan populasi mencapai 154,23 juta atau 56% dari total populasi di Indonesia. Meskipun Pulau Jawa memiliki kontribusi ekonomi terbesar dan berbagai keunggulan struktural, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Daerah Penerima TKD Tertinggi 2023

Provinsi	TKD
Jawa Timur	79.190,45 M
Jawa Barat	68.596,66 M
Jawa Tengah	66.291,58 M
Sumatra Utara	42.104,61 M
Kalimantan Timur	39.524,15 M

Sumber: DJPK Kemenkeu

Hal ini mencerminkan bahwa tingginya PDB dan kepadatan penduduk belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan DJPK pada tahun 2023 provinsi di Pulau Jawa menempati tiga posisi teratas dengan penerima TKD tertinggi, yaitu Jawa Timur sebesar Rp 79.190,45 miliar, Jawa Barat sebesar Rp 68.596,66 miliar, dan terakhir Jawa Tengah sebesar Rp 66.291,58 miliar.



**Grafik 1.** Laju Pertumbuhan Ekonomi Se-Pulau Jawa Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional

Pada tiga fase ini, pertumbuhan ekonomi menunjukkan data yang fluktuatif menggambarkan bahwa ketergantungan yang berbeda dan signifikan atas TKD, diperlukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana yang terjadi atas pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Peningkatan ekonomi di suatu daerah dapat mendorong naiknya pendapatan per kapita, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi dan produktivitas masyarakat. Semakin besar pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini turut mendorong peningkatan sumber pendapatan daerah, termasuk PAD dan dana transfer, yang kemudian

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih optimal dan memadai melalui belanja modal (Anthony & Rohman, 2024).

**Tabel 2.** Kontribusi PAD atas Belanja Daerah Se-Pulau Jawa 2018-2028

Provinsi	PAD	Belanja Daerah	% PAD Terhadap BD
Banten	7.164.303.333.333	10.991.193.333.333	65%
DKI Jakarta	43.800.623.333.333	61.931.896.666.667	71%
Jawa Barat	45.175.138.333.333	128.950.875.000.000	35%
Jawa Tengah	30.407.300.000.000	104.584.736.666.667	29%
DI Yogyakarta	4.746.550.000.000	11.068.043.333.333	43%
Jawa Timur	40.719.693.333.333	87.827.410.000.000	46%

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data diolah)

Rendahnya kontribusi PAD mengindikasikan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya melalui skema TKD. Ketergantungan ini menjadi perhatian dalam konteks desentralisasi fiskal, karena idealnya pemerintah daerah mampu membiayai sebagian besar kebutuhan belanjanya secara mandiri. Situasi ini juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta inovasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan LRA yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi se-Pulau Jawa tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran adalah belanja pegawai sebesar 38,76%, lalu dilanjut dengan belanja barang dan jasa sebesar 32,06%. Sementara itu, belanja modal hanya 15,77%, padahal belanja modal berpotensi menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah. Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Syahrina & Ermawati (2020) anggaran pemerintah daerah sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dapat dianggap tidak efektif dan masyarakat tidak menerima manfaatnya. Berdasarkan ringkasan tersebut, terlihat bahwa alokasi belanja daerah masih lebih difokuskan pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Padahal, seharusnya anggaran tersebut dialokasikan secara seimbang dengan memberikan prioritas lebih pada belanja modal, karena jenis belanja ini memiliki manfaat jangka panjang dan nilai produktif yang lebih tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Penelitian oleh Pramudya & Anis (2024) menunjukkan bahwa *flypaper effect* menjadi fenomena yang serius dimana pada tahun periode 2017-2021 dari 508 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 463 atau 91% pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mengalami *flypaper effect*. (Sidhi & Dewi, 2023) dalam penelitiannya yang meneliti di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan Jawa memperoleh hasil bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* karena koefisien yang dimiliki PAD (0,075) lebih rendah dibandingkan dengan DAU (0,796). Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Deviana dkk., 2024) menegaskan bahwa *flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur pada tahun 2018-2022, yang disebabkan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan PAD. Namun beberapa penelitian menyatakan hasil yang sebaliknya, penelitian oleh (Apriliani & Sudjana, 2023) menghasilkan bahwa tidak ditemukan *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021. Fenomena *flypaper effect* tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa penelitian terdahulu telah mempelajari lebih lanjut tentang *flypaper effect* diantaranya adalah Parajuli (2023) membahas tentang keberadaan *flypaper effect* dan *asymmetric effect* dalam hubungan antara transfer fiskal dan belanja pemerintah lokal di Nepal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dick-Sagoie dkk., (2022) membahas tentang *flypaper effect* pada tindakan

fiskal pejabat setempat di Ghana. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa dana transfer dari pusat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah.

Dengan pemaparan di atas penulis termotivasi untuk menganalisis lebih dalam terkait *flypaper effect* pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Selain itu, penelitian ini menganalisis menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengetahui bagaimana daerah merespons TKD dibandingkan dengan PAD. Mengingat jumlah TKD yang diterima pemerintah kabupaten/kota se-Pulau Jawa yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penelitian ini mengikuti saran atas penelitian sebelumnya (Septriani dkk., 2020), (Lani et al., 2024), (Zakaria & Lathifah, 2024) (Chadiza et al., 2022), dan (Citra & Kurnia, 2024) yang menyatakan bahwa untuk menambah cakupan kajian dan rentang waktu terbaru terhadap fenomena *flypaper effect*. Tak hanya itu, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara komprehensif terkait kondisi daerah yang terkena *flypaper effect*.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Velantina & Haryanto (2024) mengatakan teori keagenan membahas hubungan kontraktual dan menyoroti permasalahan serta solusi yang muncul dari interaksi antara individu, kelompok, atau organisasi. Dalam hubungan ini, satu pihak berperan sebagai prinsipal yang membuat kontrak, sementara pihak lainnya bertindak sebagai agen yang diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal (Kusyala & Badrudin, 2023). Menurut Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI), Pierce Jr (1989) mengatakan pemerintahan juga dapat ditinjau melalui sudut pandang teori keagenan, yang menggambarkan hubungan antara pihak prinsipal dan agen. Eksekutif berperan sebagai agen yang menerima mandat dari rakyat melalui proses pemilihan, sementara legislatif menjalankan fungsi pengawasan serta menjadi penyeimbang kekuasaan dalam sistem pemerintahan, juga atas dasar pilihan rakyat. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah memiliki peran ganda sebagai prinsipal maupun agen. Ketika bertindak sebagai agen, Pemerintah Daerah menerima mandat dari prinsipal, yaitu masyarakat yang diwakili oleh DPR serta Pemerintah Pusat. Hubungan ini mencerminkan bentuk nyata interaksi antara agen dan prinsipal yang patut menjadi perhatian publik.

### *Flypaper Effect*

Istilah *flypaper effect* pertama kali diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld pada tahun 1979. Konsep ini merujuk pada pandangan Arthur Okun (1930) mengenai ungkapan "*money sticks where it hits,*" yang menggambarkan bahwa uang cenderung tetap berada di tempat pertama kali diterima, layaknya seekor lalat yang menempel pada kertas perangkap lalat (Dewi & Aminda, 2023). Merujuk pada Zakaria & Lathifah (2024) *flypaper effect* adalah kondisi di mana pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai pengeluarannya dibandingkan memanfaatkan PAD. *Flypaper effect* dianggap terjadi ketika kedua variabel, PAD dan TKD, sama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun besarnya pengaruh TKD lebih dominan dibandingkan PAD. Selain itu, *flypaper effect* juga dapat terindikasi apabila PAD tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD merupakan pendapatan didapatkan oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lainnya yang sah. PAD adalah

pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang berada di wilayah yang menjadi yurisdiksinya (Tirtana et al., 2023). PAD memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang mandiri dan berkelanjutan.

#### **Transfer ke Daerah (TKD)**

Transfer ke Daerah (TKD) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah dana berasal dari APBN dan merupakan belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyaluran TKD dilakukan dengan cara memindahkan dana dari kas negara ke kas daerah. Proses penyaluran dapat dilakukan secara sekaligus maupun bertahap dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah kemampuan keuangan negara.

#### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Aspek ini memainkan peran penting dalam menganalisis struktur dan arah perkembangan ekonomi suatu negara (Chadiza et al., 2022). Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kemajuan dan kesejahteraan suatu negara, yang tercermin melalui perubahan *output* atau produksi nasional. Secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi biasanya diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai pasar dari total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai variabel moderasi karena mampu menjelaskan bagaimana konteks makroekonomi daerah memengaruhi kekuatan hubungan antara sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah.

#### **Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang hingga kini menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional, khususnya di daerah-daerah dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang mencakup kebutuhan makanan dan non-makanan minimum.

#### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai aspek seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan sektor industri. Menurut (Fahrika et al., 2020), pembangunan ekonomi yang efektif harus didukung oleh kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan yang menekankan pentingnya pemerataan dan pengurangan kemiskinan (Fahrika et al., 2020).

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan *mixed method* dengan pendekatan *explanatory sequential design* dengan menggabungkan analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk memungkinkan data kualitatif memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap temuan awal dari data kuantitatif, sehingga menjadi penting untuk mengintegrasikan atau mengaitkan hasil kuantitatif dengan proses pengumpulan data kualitatif (Creswell 2018). Model ini digunakan karena mampu menganalisis bagaimana pengaruh TKD atau

PAD terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi, serta menelusuri dinamika dan kondisi daerah yang terkena dari fenomena *flypaper effect*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, dan referensi ilmiah untuk memperoleh landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teknik penelusuran informasi melalui internet (*Internet Research*) sebagai pelengkap dalam memperoleh data dan teori yang relevan dengan mengakses data dan teori melalui situs resmi seperti [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 118 kabupaten/kota, yang terdiri dari 84 kabupaten dan 34 kota yang tersebar di enam provinsi se-Pulau Jawa. Pemilihan sampel harus dilakukan dengan metode yang tepat agar hasil penelitian bisa digeneralisasi ke populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *cluster sampling* berdasarkan aspek administratif kabupaten/kota di Pulau Jawa. Pada penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengambil pemerintah kabupaten dan kota yang terkena *flypaper effect* dengan penerima TKD tertinggi, menengah, dan terendah. Dengan demikian, sampel untuk kuantitatif berjumlah 113 kabupaten/kota se-Pulau Jawa dengan rentang waktu penelitian berdasarkan data selama 6 tahun yaitu 2018-2023, sehingga pada penelitian ini memiliki 678 sampel dan sampel kualitatif berjumlah 6 pemerintah daerah dengan 3 pemerintah kota dan 3 pemerintah kabupaten, karena pemerintah kota dan kabupaten memiliki perbedaan fokus pengelolaan dan kompleksitas administratif. Sampel ini mampu mempresentasikan populasi berdasarkan pemda yang terindikasi *flypaper effect* dengan kategori penerima TKD tertinggi, menengah, dan terendah.

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan bantuan *software E-Views*. Aplikasi ini banyak digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan analis ekonomi karena memiliki tampilan yang *user-friendly* serta mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat. Menurut Sugiyanto dkk., (2022), regresi data panel merupakan metode analisis statistik yang dapat menganalisis data dua dimensi, yaitu dimensi waktu (*time series*) dan dimensi individu (*cross-sectional*). Dalam metode regresi data panel, terdapat tiga model yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Setelah model terpilih dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Dan terakhir dilakukan uji hipotesis dan uji fenomena *flypaper effect* diidentifikasi melalui perbandingan antara pengaruh TKD dan PAD terhadap Belanja Daerah. Setelah dilakukannya analisis kuantitatif beralih ke analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Kuantitatif

#### Uji Model Regresi Data Panel

##### 1. Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow di Pulau Jawa tahun 2018-2023

	Statistic	df	Probability
Fase Pra-pandemi	19.745306	(112,108)	0,0000
Fase Krisis Pandemi	28.452433	(112,108)	0,0000
Fase Pemulihan	36.871176	(112,108)	0,0000

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Pada tiga fase, uji chow menunjukkan bahwa *probability*  $0,0000 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

## 2. Uji Hausman

**Tabel 4.** Hasil Uji Hausman di Pulau Jawa tahun 2018-2023

	<b>Chi-Sq Statistic</b>	<b>Chi-Sq df</b>	<b>Probability</b>
Fase Pra-pandemi	23.017135	5	0,0003
Fase Krisis Pandemi	302.785950	5	0,0000
Fase Pemulihan	43.237063	5	0,0000

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Pada tiga fase, uji hausman menunjukkan bahwa  $probability\ 0,0000-0,0003 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

## 3. Hasil Uji Model

### a. Fase Pra-pandemi (2018-2019)

**Tabel 5.** Model Fixed Effect Model pada Fase Pra-pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.66E+12	3.97E+11	6.710920	0.0000
X1	1.981049	0.218771	9.055371	0.0000
X2	-0.783110	0.228264	-3.430714	0.0009
Z	-3.71E+11	6.37E+10	-5.819476	0.0000
X1Z	-0.053062	0.040315	-1.316195	0.1909
X2Z	0.269865	0.038523	7.005240	0.0000

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

### b. Fase Krisis Pandemi (2020-2021)

**Tabel 6.** Model Fixed Effect Model pada Fase Krisis Pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.05E+12	1.08E+11	18.97402	0.0000
X1	0.595521	0.166578	3.575033	0.0005
X2	0.117326	0.064038	1.832137	0.0697
Z	1.74E+10	7.22E+09	2.405234	0.0179
X1Z	0.007612	0.004653	1.635812	0.1048
X2Z	-0.014729	0.004993	-2.949848	0.0039

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

### c. Fase Pemulihan (2022-2023)

**Tabel 7.** Model Fixed Effect Model pada Fase Krisis Pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.04E+12	2.35E+11	4.431794	0.0000
X1	0.554765	0.155174	3.575119	0.0005
X2	0.769894	0.130070	5.919065	0.0000
Z	-9.81E+10	2.51E+10	-3.901899	0.0002
X1Z	0.082959	0.031100	2.667517	0.0088
X2Z	0.027304	0.007704	3.544303	0.0006

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dari model regresi terdistribusi normal. Asumsi normalitas penting untuk validitas inferensi statistik, terutama dalam konteks uji hipotesis.

**Tabel 8.** Hasil Uji Normalitas di Pulau Jawa tahun 2018-2023

	Jarque-Bera	Probability
Fase Pra-pandemi	0,597741	0,741655
Fase Krisis Pandemi	3,897716	0,142437
Fase Pemulihan	0,007560	0,996227

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Pada tiga fase, uji normalitas menunjukkan *probability* lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal.

**2. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi.

**Tabel 9.** Hasil Uji Multikolinearitas di Pulau Jawa tahun 2018-2023

	2018-2019	2020-2021	2022-2023
X <sub>1</sub>	1,718812	2,589273	2,026008
X <sub>2</sub>	1,429357	2,639472	1,517194
LnZ	3,127274	1,592660	1,317768
X <sub>1</sub> :Z	2,669577	3,643471	6,283815
X <sub>2</sub> :Z	5,247248	3,439183	5,375452

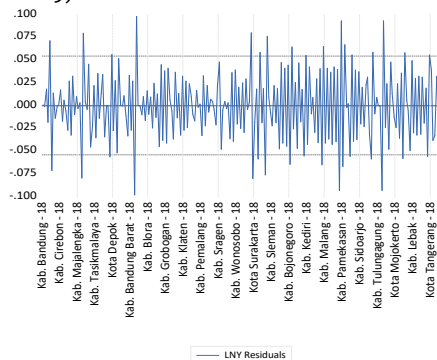
Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Pada tiga fase, uji Multikolinearitas menunjukkan nilai VIF<10, maka data tidak ada Multikolinearitas.

**3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi.

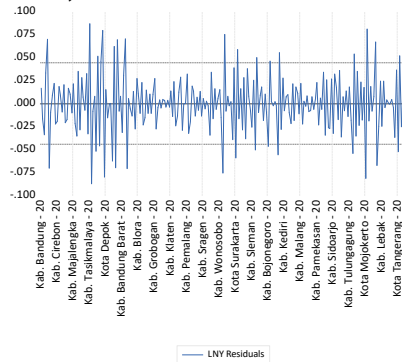
**a. Fase Pra-pandemi (2018-2019)**



**Grafik 2.** Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Fase Pra-pandemi

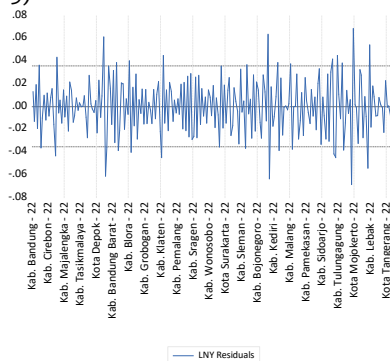
Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

b. Fase Krisis Pandemi (2020-2021)



**Grafik 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Fase Krisis Pandemi  
Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

c. Fase Pemulihan (2022-2023)



**Grafik 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Fase Krisis Pandemi  
Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Pada tiga fase, uji heteroskedastisitas menunjukkan grafik residu tidak melewati batas 500 dan -500, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**1. Uji t**

a. Fase Pra-pandemi (2018-2019)

**Tabel 10.** Hasil uji t di Pulau Jawa pada fase pra-pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.66E+12	3.97E+11	6.710920	0.0000
X1	1.981049	0.218771	9.055371	0.0000
X2	-0.783110	0.228264	-3.430714	0.0009
Z	-3.71E+11	6.37E+10	-5.819476	0.0000
X1Z	-0.053062	0.040315	-1.316195	0.1909
X2Z	0.269865	0.038523	7.005240	0.0000

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Hasil uji t pada fase pra-pandemi menjelaskan pengaruh parsial dari variabel, sebagai berikut:

- 1) Variabel PAD ( $X_1$ ) diperoleh nilai t hitung 9,055371 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0000 < 0,05, maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, artinya variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018-2019. Koefisien yang diperoleh sebesar 1,981049, maka menimbulkan pengaruh positif.
- 2) Variabel TKD ( $X_2$ ) diperoleh nilai t hitung 3,430714 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0009 < 0,05, maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, artinya variabel TKD berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018-2019. Koefisien yang diperoleh sebesar -0,783110, maka menimbulkan pengaruh negatif.
- 3) Variabel interaksi PAD\*PE ( $X_1Z$ ) diperoleh nilai t hitung 1,316195 < t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,1909 > 0,05, maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{03}$  diterima. Koefisien yang diperoleh sebesar -0,053062, maka menimbulkan pengaruh negatif. Artinya variabel PAD\*PE tidak berpengaruh terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018-2019
- 4) Variabel interaksi TKD\*PE ( $X_2Z$ ) diperoleh nilai t hitung 7,005240 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0000 < 0,05, maka  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima, artinya variabel TKD\*PE berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2018-2019. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,269865, maka menimbulkan pengaruh positif.

#### b. Fase Krisis Pandemi (2020-2021)

**Tabel 11.** Hasil uji t di Pulau Jawa pada fase krisis pandemi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.05E+12	1.08E+11	18.97402	0.0000
X1	0.595521	0.166578	3.575033	0.0005
X2	0.117326	0.064038	1.832137	0.0697
Z	1.74E+10	7.22E+09	2.405234	0.0179
X1Z	0.007612	0.004653	1.635812	0.1048
X2Z	-0.014729	0.004993	-2.949848	0.0039

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Hasil uji t pada fase krisis pandemi menjelaskan pengaruh parsial dari variabel, sebagai berikut:

- 1) Variabel PAD ( $X_1$ ) diperoleh nilai t hitung 3,575033 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0005 < 0,05, maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, artinya variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2020-2021. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,595521, maka menimbulkan pengaruh positif.
- 2) Variabel TKD ( $X_2$ ) diperoleh nilai t hitung 1,832137 < t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0697 > 0,05, maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{02}$  diterima. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,117326, maka menimbulkan pengaruh positif. Artinya variabel TKD tidak berpengaruh terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2020-2021.
- 3) Variabel interaksi PAD\*PE ( $X_1Z$ ) diperoleh nilai t hitung 1,635812 < t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,1048 > 0,05, maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{03}$  diterima. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,007612, maka menimbulkan pengaruh positif. Artinya variabel PAD\*PE tidak berpengaruh terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2020-2021.
- 4) Variabel interaksi TKD\*PE ( $X_2Z$ ) diperoleh nilai t hitung 2,949848 < t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0039 < 0,05, maka  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima, artinya variabel TKD\*PE berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2020-2021. Koefisien yang diperoleh sebesar -0,014729, maka menimbulkan pengaruh negatif.

## c. Fase Pemulihan (2022-2023)

**Tabel 12.** Hasil uji t di Pulau Jawa pada fase pemulihan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.05E+12	1.08E+11	18.97402	0.0000
X1	0.595521	0.166578	3.575033	0.0005
X2	0.117326	0.064038	1.832137	0.0697
Z	1.74E+10	7.22E+09	2.405234	0.0179
X1Z	0.007612	0.004653	1.635812	0.1048
X2Z	-0.014729	0.004993	-2.949848	0.0039

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Hasil uji t pada fase pemulihan menjelaskan pengaruh parsial dari variabel, sebagai berikut:

- 1) Variabel PAD ( $X_1$ ) diperoleh nilai t hitung 3,575119 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0005 < 0,05, maka  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, artinya variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2022-2023. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,554765, maka menimbulkan pengaruh positif.
- 2) Variabel TKD ( $X_2$ ) diperoleh nilai t hitung 5,919065 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0000 < 0,05, maka  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, artinya variabel TKD berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2022-2023. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,769894, maka menimbulkan pengaruh positif.
- 3) Variabel interaksi PAD\*PE ( $X_1Z$ ) diperoleh nilai t hitung 2,667517 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0088 < 0,05, maka  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima, artinya variabel PAD\*PE berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2022-2023. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,082959, maka menimbulkan pengaruh positif.
- 4) Variabel interaksi TKD\*PE ( $X_2Z$ ) diperoleh nilai t hitung 3,544303 > t tabel yaitu 2,255094 dan nilai signifikan 0,0006 < 0,05, maka  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima, artinya variabel TKD\*PE berpengaruh signifikan terhadap BD pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tahun 2022-2023. Koefisien yang diperoleh sebesar 0,027304, maka menimbulkan pengaruh positif.

## 2. Uji F

**Tabel 13.** Hasil Uji F di Pulau Jawa tahun 2018-2023

	<i>F-statistic</i>	<i>Prob (F-statistic)</i>
Fase Pra-pandemi	235,3619	0.000000
Fase Krisis Pandemi	226,4859	0.000000
Fase Pemulihan	484,7228	0.000000

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Hasil uji F pada fase tiga fase menunjukkan nilai *F-statistic* lebih besar dari F tabel yaitu 1,970611 disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan interaksi 1 (PAD\*PE) serta 2 (TKD\*PE) secara bersama-sama mampu mempengaruhi terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018-2023.

2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**Tabel 14.** Hasil Uji t di Pulau Jawa tahun 2018-2023

	<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-statistic</i>
Fase Pra-pandemi	0,996093	0.991861

	<b>R-squared</b>	<b>Adjusted R-statistic</b>
Fase Krisis Pandemi	0,995941	0,991544
Fase Pemulihan	0,998099	0,996040

Sumber: E-Views 12 (Data diolah)

Pada tiga fase memperoleh nilai *Adjusted R-squared* hampir sebesar 1 atau 100%, artinya model ini mampu menjelaskan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan interaksi 1 (PAD\*PE) serta 2 (TKD\*PE) mampu menjelaskan variabel Belanja Daerah. Sementara sisanya dijelaskan diluar model dalam penelitian.

#### Uji Flypaper Effect

Menurut Cárdenas dkk., 2011) dalam (Somantri et al., 2024) *flypaper Effect* dapat diidentifikasi melalui perbandingan antara pengaruh TKD dan PAD terhadap Belanja Daerah. Jika nilai koefisien atau pengaruh TKD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah dan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, maka daerah tersebut terindikasi *flypaper effect*. Berdasarkan hasil pengujian pada tiga fase pada periode 2018-2023. Pada tahun 2018-2019, fase satu memiliki koefisien  $1,98104916582 * X_1$  dan  $-0,783110205474 * X_2$ . Pada tahun 2020-2021, fase dua memiliki koefisien  $0,595520824076 * X_1$  dan  $0,117326279394 * X_2$ . Pada tahun 2022-2023, fase ketiga memiliki koefisien  $0,554765046532 * X_1$  dan  $0,769893995627 * X_2$ .

#### Hasil Analisis Kualitatif

Pada hasil analisis kualitatif dengan sampel setiap fase yang mengalami *flypaper effect* dengan tiga kategori penerima TKD, tertinggi, menengah, dan terendah diambil satu pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota, yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil analisis kualitatif

Kategori	Wilayah	Penduduk Miskin	Pembangunan Ekonomi
Tertinggi	Kab. Bojonegoro	- Tingkat kemiskinan tinggi (13,16% ke 12,18%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (4,19% ke 4,63%) - UMK (1.720.460 ke 2.279.568)	- PDRB (Rp 65.815,56 miliar ke Rp 63.310,69 miliar) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (4,39% ke 2,47%) - 10 rumah sakit serta dengan puskesmas di setiap kecamatan dilengkapi tenaga medis yang melimpah. - Rata-rata lama sekolah (6,77 tahun ke 7,45 tahun) dengan persentase angka melek huruf 93,07% - IKLH (64,89% ke 70,10) fluktuatif namun cenderung meningkat.
	Kota Tasikmalaya	- Tingkat kemiskinan tinggi (12,71% ke 11,53%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (6,89% ke 6,55%) - UMK (1.931.435 ke 2.533.341)	- PDRB (Rp 14.859,11 miliar ke Rp 17.781,93 miliar) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,93% ke 5,96%) - 8 rumah sakit serta dengan puskesmas di setiap kecamatan dilengkapi tenaga medis yang melimpah. - Rata-rata lama sekolah (9,21 tahun ke 9,72 tahun) dengan persentase angka melek huruf 99,81%.

Kategori	Wilayah	Penduduk Miskin	Pembangunan Ekonomi
Menengah	Kab. Wonogiri	- Tingkat kemiskinan tinggi (10,75% ke 10,94%)	- IKLH (data tidak lengkap, tahun 2021 sebesar 63,85% ke 57,02%)
		- Tingkat Pengangguran Terbuka (2,28% ke 1,92%)	- PDRB (Rp 19.837,02 miliar ke Rp 23.566,88 miliar)
		- UMK (Rp 1.542.000 ke Rp 1.968.448)	- Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,41% ke 4,98%) - 9 rumah sakit serta dengan puskesmas di setiap kecamatan dilengkapi tenaga medis yang melimpah. - Rata-rata lama sekolah (7 tahun ke 7,72 tahun) dengan persentase angka melek huruf yang sangat rendah 92,01%. - IKLH (data tidak lengkap, hanya ada tahun 2021 dan 2022 sebesar 63,72% ke 64,91%)
Menengah	Kota Batu	- Tingkat kemiskinan tinggi (3,89% ke 3,22%)	- PDRB (Rp 11.065,99 miliar ke Rp 12.936,60 miliar)
		- Tingkat Pengangguran Terbuka (3,07% ke 4,52%)	- Laju Pertumbuhan Ekonomi (6,50% ke 6,20%)
		- UMK (Rp 2.384.167 ke Rp 3.030.367)	- 6 rumah sakit serta dengan puskesmas di setiap kecamatan dilengkapi tenaga medis yang melimpah. - Rata-rata lama sekolah (8,77 tahun ke 9,85 tahun) dengan persentase angka melek huruf adalah 97,85%. - IKLH (data tidak lengkap mulai tahun 2021 sebesar 72,24% ke 75,12%)
Terendah	Kab. Pangandaran	- Tingkat kemiskinan tinggi (8,12% ke 8,98%)	- PDRB (Rp 7.308,73 miliar ke Rp 8.869,86 miliar)
		- Tingkat Pengangguran Terbuka (3,59% ke 1,52%)	- Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,32% ke 5,26%)
		- UMK (Rp 1.558.793,94 ke Rp 2.018.389)	- 1 rumah sakit serta dengan puskesmas di setiap kecamatan dilengkapi tenaga medis yang kurang memadai. - Rata-rata lama sekolah (8,00 tahun ke 8,47 tahun) dengan persentase angka melek huruf adalah 99,29%. - IKLH (data tidak lengkap, hanya ada tahun 2021 dan 2022 sebesar 60,24% ke 62,87%)
Terendah	Kota Banjar	- Tingkat kemiskinan tinggi (5,7% ke 6,14%)	- PDRB (Rp 3.067,11 miliar ke Rp 3.682,3 miliar)
		- Tingkat Pengangguran Terbuka (5,95% ke 5,43%)	- Laju Pertumbuhan Ekonomi (5,05% ke 4,63%)
		- UMK (Rp 1.558.793,94 ke Rp 2.018.389)	- 3 rumah sakit serta dengan puskesmas di setiap kecamatan dilengkapi tenaga medis yang melimpah.

Kategori	Wilayah	Penduduk Miskin	Pembangunan Ekonomi
		- UMK (Rp 1.562.730,28 ke Rp 1.998.119,05)	- Rata-rata lama sekolah (8,66 tahun ke 8,99 tahun) dengan persentase angka melek huruf adalah 98,95%. - IKLH (data tidak lengkap ada tahun 2020 sebesar 59,20% ke 62,72%)

Sumber: Badan Pusat Statistika

## Pembahasan

### Pembahasan Hasil Analisis Kuantitatif

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis dari tiga fase waktu (2018–2019, 2020–2021, dan 2022–2023), dapat disimpulkan bahwa PAD secara konsisten memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Pada fase pra-pandemi (2018–2019), pengaruh PAD terhadap BD sangat kuat, ditunjukkan oleh nilai koefisien tertinggi 1,981049, yang mencerminkan bahwa peningkatan PAD secara langsung mendorong peningkatan BD dalam skala besar. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa PAD merupakan komponen strategis dalam mendukung kapasitas belanja daerah, dan peningkatannya secara berkelanjutan dapat memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya Somantri (2024) Lani dkk. (2024) Kusyala & Badrudin (2023) dan Pramudya & Anis (2024).

Hasil analisis ini mendukung teori dalam Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi. Temuan ini juga konsisten dengan pendapat Tirtana dkk. (2023) bahwa semakin tinggi PAD, maka semakin besar kemandirian fiskal daerah dan daya dorongnya terhadap belanja daerah. Menurut teori keagenan, relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai agen dan prinsipal mendorong penggunaan PAD secara efisien. Ketika PAD meningkat, pemerintah terdorong untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal, bukan semata bergantung pada transfer dari pusat.

#### Pengaruh Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis dari tiga fase waktu (2018–2019, 2020–2021, dan 2022–2023), diperoleh bahwa pengaruh TKD terhadap BD mengalami dinamika yang signifikan sesuai kondisi ekonomi masing-masing periode. Pada fase pra-pandemi (2018–2019), TKD justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap BD, yang mengindikasikan bahwa peningkatan TKD tidak serta-merta mendorong belanja daerah, bahkan cenderung menurunkannya. Hal ini dapat mencerminkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan dana transfer atau dominasi belanja non-produktif. Sementara pada fase krisis pandemi (2020–2021), TKD tidak berpengaruh terhadap BD. Kemungkinan besar karena realokasi anggaran untuk penanganan pandemi yang menyebabkan hubungan TKD dan belanja daerah menjadi tidak konsisten. Namun pada fase pemulihan (2022–2023), TKD terbukti memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana transfer mulai efektif kembali dalam mendorong aktivitas belanja publik. Secara keseluruhan, hubungan antara TKD dan Belanja Daerah berkembang dari hubungan negatif menuju positif, mencerminkan perbaikan dalam tata kelola fiskal daerah dan pemulihan ekonomi yang lebih stabil pasca-pandemi. Sejalan dengan penelitian terdahulu Anthony & Rohman (2024) pada fase pemulihan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Namun pada fase lainnya menunjukkan perbedaan. Pada penelitian terdahulu sebagian besar memisahkan dana transfer sehingga tidak mampu menjadi pembanding pada variabel ini.

**Commented [W11]:** Pembahasan seharusnya dihubungkan dengan teori-teori yang disampaikan pada Landasan Teori di atas.

TKD ditemukan memiliki pengaruh signifikan dan lebih dominan dibanding PAD. Ini selaras dengan teori *flypaper effect* yang dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam (Dewi & Aminda, 2023), bahwa dana dari pusat “menempel” di belanja pemerintah daerah, seperti “lalat pada kertas perangkap”. Hasil ini diperkuat oleh *The Bureaucratic Model* yang menyatakan bahwa birokrat daerah lebih nyaman membelanjakan dana transfer daripada memaksimalkan potensi PAD. Pengaruh dominan TKD menunjukkan potensi ketergantungan fiskal. Padahal, seperti dijelaskan dalam landasan teori, desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah. Ketergantungan yang tinggi pada TKD justru dapat menghambat pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil analisis dari tiga fase waktu (2018–2019, 2020–2021, dan 2022–2023), dapat disimpulkan bahwa PE memiliki peran moderasi yang berkembang secara bertahap terhadap hubungan antara PAD dan BD di kabupaten/kota di Pulau Jawa. Pada fase pra-pandemi (2018–2019) dan krisis pandemi (2020–2021), PE tidak mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap BD. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, peningkatan PE belum cukup kuat untuk memperkuat atau mengubah arah hubungan PAD terhadap belanja daerah. Namun, pada fase pemulihan (2022–2023), PE terbukti mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Ini mengindikasikan bahwa saat ekonomi mulai pulih, sinergi antara peningkatan PAD dan PE menjadi lebih efektif dalam mendorong peningkatan belanja daerah. Secara keseluruhan, peran PE sebagai variabel moderasi terhadap hubungan PAD dan BD menunjukkan peningkatan efektivitas dari waktu ke waktu, sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi. Hasil penelitian pada fase pemulihan, sejalan dengan yang dilakukan oleh Anthony & Rohman (2024) dan Citra & Kurnia (2024) yang menyatakan bahwa PE mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

PE terbukti memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada fase pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang membaik, daerah mampu mengoptimalkan PAD sebagai dasar belanja publik. Menurut Anthony & Rohman (2024), pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kenaikan konsumsi dan produktivitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya penerimaan PAD. Oleh karena itu, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung lebih responsif dalam mengalokasikan belanja berdasarkan sumber penerimaan asli.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh TKD terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil analisis dari tiga fase waktu (2018–2019, 2020–2021, dan 2022–2023), dapat disimpulkan bahwa PE secara konsisten mampu memperkuat pengaruh antara TKD terhadap BD pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa pada fase krisis pandemi (2018–2019) dan fase pemulihan (2022–2023). Namun, pada fase krisis pandemi (2020–2021), PE tidak mampu memoderasi pengaruh TKD terhadap BD akibat perubahan prioritas fiskal dan penyesuaian anggaran selama masa darurat. Pada fase krisis pandemi hasil penelitiannya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anthony & Rohman (2024) yang menyatakan bahwa PE tidak mampu memperkuat pengaruh TKD terhadap Belanja Daerah.

Moderasi PE terhadap pengaruh TKD ditemukan bervariasi antar fase. Pada fase krisis pandemi, pengaruh TKD terhadap belanja lebih besar dibandingkan saat PE stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam situasi krisis, pemerintah daerah lebih mengandalkan bantuan dari pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa PE daerah menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas TKD. Jika PE rendah, belanja lebih bergantung pada dana pusat. Sebaliknya, jika ekonomi pulih, daerah lebih mampu mengelola TKD secara efisien dan mengarahkannya pada belanja produktif.

### Fenomena Flypaper Effect

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena flypaper effect mengalami fluktuasi selama periode 2018–2023. Pada tahun 2018 dan 2019, sebanyak 78% kabupaten/kota atau 88 daerah terindikasi mengalami *flypaper effect*, namun menurun drastis pada tahun 2020 dan 2021 menjadi masing-masing 15% dan 20% (17 dan 23 daerah). Tren ini kembali meningkat tajam pada tahun 2022 dan 2023 hingga mencapai 99% dan 98% atau setara 112 dan 111 daerah. Temuan ini sejalan dengan pendapat Zakaria & Lathifah (2024) yang menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap TKD dibandingkan PAD, menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan fiskal daerah. Penjelasan ini diperkuat oleh teori *fiscal illusion* yang menyatakan bahwa masyarakat seringkali mengalami ilusi seolah anggaran publik meningkat, padahal peningkatan tersebut bersumber dari dana transfer, bukan dari optimalisasi PAD Nurosidah dkk. (2023). Ilusi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memperhatikan sumber pendanaan dan alokasi belanja secara rasional Chadiza dkk. (2022). Selain itu, model *The Bureaucratic* dari Acar (2019) dalam Hamsyi & Fitriyani (2021) juga menjelaskan bahwa *flypaper effect* dipengaruhi oleh kenyamanan birokrat dalam menggunakan dana transfer ketimbang menaikkan pajak, yang berdampak pada belanja yang boros dan tidak efisien. Fenomena tingginya *flypaper effect* pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan dominasi birokrasi dalam pengambilan keputusan fiskal yang cenderung mengandalkan dana pusat. Sebaliknya, rendahnya *flypaper effect* pada tahun 2020–2021 dapat dikaitkan dengan kondisi pra-pandemi yang memaksa daerah untuk lebih fokus pada efisiensi belanja dan peningkatan PAD.

Ketidakeimbangan antara PAD dan TKD serta pola belanja yang kurang efisien dapat dianalisis dari teori keagenan. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai agen belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan masyarakat (prinsipal) dalam mengelola sumber daya fiskal. Kecenderungan untuk mengandalkan TKD dan tidak memaksimalkan PAD menunjukkan potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Velantina & Haryanto 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi dan menunjukkan bahwa otonomi fiskal daerah belum berjalan secara optimal. Fenomena flypaper ini bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 2022, yang menekankan penguatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengelolaan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer.

### Pembahasan Hasil Analisis Kualitatif

Berdasarkan analisis terhadap daerah dengan kategori penerimaan TKD tertinggi, menengah, dan terendah, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya dana TKD yang diterima suatu daerah tidak secara otomatis menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial. Tak hanya itu, pengelolaan APBD lebih baik provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keberhasilan pembangunan justru lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan APBD, khususnya dalam hal perencanaan, pengalokasian, dan efektivitas belanja daerah. Secara umum, temuan ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan pengelolaan APBD di seluruh kategori penerimaan TKD. Efektivitas penggunaan dana transfer harus lebih diarahkan pada belanja yang bersifat produktif, berorientasi hasil (*outcome-based*), dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kuantitas dana yang diterima, tetapi terutama pada kualitas dan arah kebijakan belanja daerah.

Dampak nyata dari fenomena *flypaper effect* tampak pada dominasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa di seluruh daerah yang dianalisis. Baik Kabupaten Bojonegoro, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Batu, Kabupaten Pangandaran, maupun Kota Banjar menunjukkan struktur pengeluaran daerah yang lebih besar diarahkan pada pengeluaran rutin

dibandingkan belanja modal. Bahkan, porsi belanja pegawai di beberapa daerah masih melebihi batas 30% sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022, yang secara tidak langsung memperkuat gejala *flypaper effect*. Di mana belanja modal seharusnya menjadi fokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik jangka panjang (Mardiasmo, 2018). *Flypaper Effect* tidak hanya menjadi fenomena fiskal, tetapi juga mencerminkan masalah tata kelola anggaran. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dan lemahnya kontribusi PAD memperlemah kemandirian fiskal daerah. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan APBD bukan hanya pada kuantitas dana yang tersedia, tetapi juga pada kualitas pengelolannya. Dengan kata lain, temuan kualitatif ini menjadi cerminan bahwa perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mengikuti prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.

## SIMPULAN

### Simpulan

Tujuan penelitian ialah pengujian dan membuktikan pengaruh TKD atau PAD terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi, serta menelusuri dinamika dan kondisi daerah yang terkena dari fenomena *flypaper effect*. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengaruh PAD, TKD, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah di kabupaten/kota di Pulau Jawa sangat dipengaruhi oleh fase kondisi ekonomi nasional, dengan pengaruh PAD konsisten positif, pengaruh TKD fluktuatif namun membaik pasca pandemi, serta PE berperan sebagai moderasi adaptif. Fenomena *flypaper effect* yang tinggi 78% dari total 113 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat ketergantungan pada dana transfer pusat. Studi kasus di enam daerah, yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Batu, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar menegaskan bahwa besarnya TKD tidak otomatis meningkatkan kinerja pembangunan, melainkan kualitas pengelolaan APBD yang menjadi penentu utama. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pengelolaan APBD berbasis efisiensi, akuntabilitas, dan *outcome-based budgeting* menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal dan mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

### Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada enam daerah sampel sebagai penerima TKD dengan tingkatan berbeda. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada penduduk miskin dan pembangunan ekonomi, dimana tidak menggambarkan secara detail terkait daerah yang di analisis.

### Implikasi Penelitian

Untuk pemerintah, Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian fiskal dengan cara mengoptimalkan PAD melalui perluasan basis pajak dan perbaikan sistem pemungutan. Penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja juga penting, terutama dengan memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui inovasi dan pengembangan sektor unggulan sesuai potensi wilayah dapat memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan TKD agar lebih tepat sasaran, akuntabel, serta tidak menimbulkan ketergantungan fiskal yang berkepanjangan.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke luar Pulau Jawa guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena *flypaper effect* secara nasional. Penggunaan *data time series* waktu yang lebih panjang juga dapat memperkaya

Commented [W12]: Simpulan dibuatkan dalam bentuk paragraf.

analisis tren fiskal jangka panjang di daerah serta uji elastisitas untuk mengukur tingkat respons belanja daerah terhadap perubahan PAD dan TKD dari waktu ke. Di samping itu, metode kualitatif seperti wawancara mendalam dengan pemerintah daerah yang terdampak *flypaper effect* dapat memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap penyebab dan dampaknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik, K. (2022). Examining Flypaper Effect in Indonesia: Evidence After Transferring Urban-Rural Land and Building Tax to Locals Government. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 465–478. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.465-478>
- Anthony, A. R., & Rohman, A. (2024). PENGARUH PENINGKATAN PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2021). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Apriliani, D., & Sudjana. (2023). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), DanaAlokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2017-2021. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 39–50.
- Aryaputra, A., Pratiwi, F., & Aryasatya, I. R. (2022). Transfer Pemerintah Pusat Sebagai Wujud Desentralisi Fiskal dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Bentuk Upaya megatasi Ketimpangan Pendapatan, Efektif atau Tidak? *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(2), 111–118.
- Chadiza, N., Syahnur, S., Effect, F., Daerah, B., Pertumbuhan, T., Kabupaten, E., Kota, /, & Aceh, D. P. (2022). FLYPAPER EFFECT BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (Vol. 7, Issue 1).
- Citra, Y., & Kurnia. (2024). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*.
- Dewi, A. M., & Aminda, R. S. (2023). Fenomena Flypaper Effect Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2016 – 2020. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 2.
- Dick-Sagoe, C., Tingum, E. N., & Asare-Nuamah, P. (2022). Flypaper effects of Central Transfers on the spending behaviour of Ghana's central region local governments: Does status matter? *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 35(3), 297–309. <https://doi.org/10.20473/mkp.v35i32022.297-309>
- Fahrika, A. I., Zulkifli, & Juhasdi, Ma. (2020). PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA. [www.yayasanbarcode.com](http://www.yayasanbarcode.com)
- Hamsyi, N. F., & Fitriyani. (2021). Does Flypaper Effect Occurs On Local Government Expenditure. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 63–75. <https://doi.org/10.22441/profita.2021.v14i1.006>
- Kusyala, N. A. K., & Badrudin, R. (2023). Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. 17.
- Lani, O. Y., Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., & Sonbay, Y. Y. (2024). Pengaruh Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Privinsi NTT. *Journal of Education Research*, 5(4), 6735–6752.
- Parajuli, R. (2023). Does the Flypaper Effect Exist in Developing Countries? An Analysis of 2017-2019 Budget Data of Nepalese Local Governments.

- Pramudya, F., & Anis, A. (2024). Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Putra, S. A., Riyanto, V., Supartono, A. R., Emmanuel, J., Hagi, I. A., & Nurfauzi, M. A. (2024). Relevansi kemadiria Fiskal Daerah: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 17–28. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.4131>
- Septriani, Armelly, Ekaputri, R. A., & Pasaribu, E. (2020). *Analisis Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu*. 14.
- Sidhi, P. D. I., & Dewi, N. A. W. T. (2023). *Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Kota Se-Bali dan Jawa Tahun 2019-2021*.
- Somantri, A. D. (2024). Analisis Flypaper Effect dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4). <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i4.450>
- Somantri, A. D., Pitriyan, P., & Kharisma, B. (2024). Analisis Flypaper Effect dalam Perspektif Keuangan Daerah: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.460>
- Sugiyanto, E. K., Adinugroho, E. S. W. C., Jacob, J., Nuraini, Y. B. A., & Syah, S. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*.
- Syahrina, D., & Ermawati. (2020). Flypaper Effect Analysis on Local Government Budgets in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.427>
- Tirtana, D., Pradani, T., & Hayati, J. (2023). How Does Regional Income Affect Regional Spending? *Journal of International Conference Proceedings*, 6(6), 42–51. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i6.2700>
- Velantina, A., & Haryanto. (2024). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Penerimaan Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah di Indonesia pada Masa Covid-19. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 13(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Zakaria, R. A., & Lathifah, N. (2024). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2016-2022*. 3.